

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hak asasi manusia, kunci pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian serta stabilitas dalam negeri. Dengan alasan itu tentunya pendidikan juga merupakan alasan atas gugatan manusia agar haknya tidak hanya terpenuhi melainkan juga dilindungi pula oleh negara.

Politik pendidikan atau *the politics of education* adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah, tentang kesadaran kelas, tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.

Politik pendidikan adalah sikap yang konsisten dalam hal mengarahkan kontrol sosial, baik mengenai tujuan maupun metodenya terhadap sistem pendidikan. Masyarakat selalu berpikir dan bertindak secara dinamis sehingga kerap mengalami suatu perubahan yang dialektis. Oleh karena sistem pendidikan itu merupakan suatu unsur dalam sistem sosial maka sistem pendidikan pun selalu mengalami perubahan yang dialektis pula.

Pancasila merupakan ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) merupakan konstitusi sehingga setiap penyelenggaraan sendi kehidupan negara

termasuk pendidikan juga harus berpihak pada Pancasila dan UUD 45. Semua aktivitas institusi pendidikan bermuara pada pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sebagai warga negara demokratis dan bertanggung jawab (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Dewasa ini bangsa Indonesia tengah serius menggapai cita-cita untuk memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah melalui pendidikan berupaya untuk dapat menghasilkan tunas-tunas unggul dan berkualitas pada diri anak bangsa.

Akan tetapi, apa jadinya jika pendidikan justru ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan sehingga tidak membebaskan peserta didik dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Inilah yang belakangan sering terjadi dalam konteks pendidikan di negeri ini. Menurut Azzet (2020: 5), Pendidikan hanya sekedar mencerdaskan sisi intelektual saja. Anak didik tidak dibebaskan menjadi manusia seutuhnya. Kemudian menjadi manusia-manusia serakah yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Lantas, bagaimana seharusnya sebuah pendidikan tersenut?

Pandangan bahwa pendidikan bisa dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan memang diamini para pendidik, terutama kalangan pendidik radikal. Menurut mereka, dalam proses pendidikan pada dasarnya tidak ada yang bisa terlepas sama sekali dari kepentingan politik atau sistem ekonomi tertentu untuk melanggengkan kekuasaan. Kenyataan ini sudah terjadi di banyak negara, termasuk di negeri kita tercinta, Indonesia.

Pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia di klaim oleh sebagian masyarakat kurang mampu menjawab tantangan, perubahan dan tuntutan masyarakat. Pendidikan selama ini di yakini mampu menciptakan kehidupan agar lebih baik dan membantu para peserta didik mempersiapkan kebutuhan masa depannya dalam menghadapi perubahan zaman, masih jauh dari apa yang di diharapkan. Hal ini yang terjadi di dunia pendidikan kita, hasilnya masih kurang memiliki standar kualifikasi pendidikan yang berkualitas (Arif, 2014: 229-230).

Pendidikan pada saat kepemimpinan Soeharto dinilai memiliki kebijakan sentralisasi (terpusat), sehingga otoritas ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat menimba ilmu di lembaga formal yang disediakan oleh pemerintah karena aturan yang ketat pada saat itu.

Setelah Soeharto lengser dari kepemimpinannya, era reformasi tiba dan pendidikan diserahkan kembali kebijakannya melalui perwakilan otonomi daerah (desentralisasi). Namun keadaan justru membuat lembaga formal menjadi lumpung praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) era baru dengan sistem kapitalisasi yang disuguhkan dengan pendidikan yang komersil. Adanya sekolah dengan label tertentu seperti RSBI maupun SBI membuat pendidikan formal seperti kasta yang membedakan antara mampu dan tidak mampu baik secara finansial maupun kecerdasan peserta didik.

Era reformasi bagi Indonesia merupakan peluang untuk keluar dari bayang-bayang identitas ke-Indonesia-an yang tunggal. Orde baru selama 32 tahun telah menciptakan keseragaman dalam sendi kehidupan. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Periode orde baru (1968-1998) dunia pendidikan nasional mengenal empat kurikulum, yakni kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1968 disebut-sebut sebagai yang paling dipengaruhi politik, karena kecenderungan rezim orde baru menghapus jejak pendidikan era Soekarno. Sedangkan kurikulum 1975 berdasarkan catatan Darmaningtyas (2004) menjadi kurikulum pertama orde baru yang menekankan indoktrinasi ideologi Pancasila untuk seluruh jenjang pendidikan.

Selain itu, dunia pendidikan saat ini juga dihadapkan pada persoalan yang cukup pelik, di mana kurikulum yang dianggap sebagai sistem pendidikan itu sendiri masih dalam proses pembaharuan dari transisi kepemimpinan (menteri) ke kepemimpinan setelahnya. Terlebih interpretasi dari kurikulum itu sendiri masih membingungkan bagi sebagian pendidik, sehingga apa yang diharapkan dari seorang pendidik yang profesional hanyalah sebatas keinginan yang tak sepenuhnya terpenuhi, padahal pemerintah telah mensubsidikan bonus berupa sertifikasi bagi mereka.

Imbasnya pembelajaran di kelas menjadi membosankan dan hanya formalitas belaka bahwa pendidikan telah berlangsung di lembaga pendidikan formal. Peserta didik yang semestinya mendapatkan nutrisi bagi akal dan juga pembentukan karakternya justru seakan-akan telah belajar meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Guru yang katanya di gugu dan di tiru menjadi momok yang seakan-akan bahwa semuanya akan kembali kepada gurunya lagi, karena merekalah yang menjadi orang tua mereka yang membimbing serta mengarahkan lingkungan mereka di sekolah.

Freire hadir dengan sebuah penawaran baru pada sebuah konsep pendidikan yang dapat merubah secara perlahan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang demokratis. Sebuah proses pendidikan yang mengatur hubungan guru dan murid dapat berimbang sehingga bisa saling menyampaikan pendapat dan fikiran. Guru tidak hanya menyampaikan materi, sedangkan peserta didik hanya mendengarkan dan menerima apa adanya. Dalam pendidikan yang demokratis, peserta didik juga sangat penting untuk didengar pendapatnya, diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya atau dihargai apa yang menjadi keinginannya dalam proses belajar mengajar (Azzet, 2020: 47). Tapi apa daya, hal yang terjadi di dunia pendidikan saat ini adalah seperti mengisi gelas kosong atau Freire menyebutnya sebagai pendidikan gaya bank (*Banking Education*).

Pendidikan gaya bank yang diterapkan ini, di mana peserta didik diberi ilmu agar kelak mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Jadi anak didik adalah objek investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditi ekonomis lainnya yang lazim dikenal. Depositor atau investor adalah guru yang mewakili lembaga kemasyarakatan yang berkuasa, sementara depositonya berupa ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada anak didik. Anak didikpun lantas diperlakukan sebagai “bejana kosong” yang diisi sebagai sarana tabungan atau penanaman ilmu pengetahuan yang dipetik hasilnya kelak. Jadi guru adalah subjek aktif sedangkan sang anak didik adalah objek pasif yang penurut sebagai objek ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dan tidak berkesadaran (Freire: 2011).

Fenomena seperti di atas masih saja berlangsung dalam dunia pendidikan Indonesia hingga saat ini. Tidak mengherankan apabila kemudian para peserta didik merasa bosan dan enggan untuk pergi ke sekolah. Karena sekolah bagi mereka sudah seperti penjara suci yang membelenggu kebebasan mereka.

Polemik yang di alami dunia pendidikan ini seakan-akan tak menemui jalan keluarnya. Jika diteliti lebih lanjut dimana letak kesalahan pendidikan ini? jelaslah kepada sistem pendidikan tersebut yang dimana kurikulum menjadi orientasi kemana arah dan tujuan pendidikan dapat dihasilkan. Pergantian kebijakan kurikulum dirasa sangat membingungkan dan dirasa penuh ketidak pastian, hal itu tentunya akan berdampak pada kemajuan bangsa ini. Usut punya usut masih banyak kepentingan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Apabila pendidikan terpuruk, maka imbasnya masa depan bangsa ini juga akan ikut terpuruk.

Tanpa pembebasan tidak mungkin ada pembangunan masyarakat sesungguhnya. Hanya manusia yang menyadari bahwa dirinya mempunyai kemauan yang mampu membebaskan dirinya. Untuk keluar dari belenggu itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah orientasi pendidikan mulai dari akar-akarnya yang dimana terjadinya politisasi pendidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang semestinya tertuju pada polarisasi yang sesuai dengan Tujuan Negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45 sehingga terciptanya insan akademis yang tak hanya cerdas intelektual melainkan juga untuk terciptanya manusia-manusia yang berwatak dan bermartabat.

Sejatinya pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mengaktualkan potensi manusia sehingga benar-benar menjadi manusia sejati (Bagir, 2019: 35). Realitas yang nampak kita saksikan bahwa peserta didik hanya sekedar duduk manis di kelas mengikuti siklus dan alur pendidikannya tanpa melihat pasti kompetensi yang dimiliki sehingga kebanyakan dari mereka merasa kebingungan karena tak memiliki kesiapan berkarya dan pesimis dalam menatap lapangan pekerjaan untuk bekerja yang dianggap mereka sebagai tujuan akhir pendidikan. Akhirnya kebanyakan orangtua peserta didik enggan untuk menaruh perhatian lebih atas pendidikan yang sedang ditempuh oleh anak-anaknya di lembaga pendidikan karena mereka menganggap hal itu sudah lazim dan menjadi standarisasi pendidikan di Indonesia.

Sebagai makhluk hidup yang berjiwa dan bernama manusia, peserta didik sudah barang tentu juga mempunyai keinginan dan harapan-harapan. Peserta didik juga mempunyai hak untuk menyampaikan apabila ia tidak suka atau tidak setuju terhadap sesuatu hal. Sungguh, memberangus apa yang ada dalam diri peserta didik yang sudah ada sebagai fitrahnya sama dengan menjauhkan peserta didik dari hakikat kemanusiaannya. Sudah tentu, pendidikan yang membebaskan tidaklah demikian.

Di sinilah peran dan fungsi pemerintah dalam mengontrol dan membuat harapan reformasi terwujud. Pendidikan yang terlihat monoton dalam praktik lapangannya sehingga diperlukan suatu kebijakan politik dalam pendidikan itu sendiri untuk menyongsong peradaban bangsa yang lebih maju dengan tunas dan bibit unggul yang diciptakan, yakni peserta didik yang dididik di sekolahnya. Dengan kehadiran konsep Freire yang bertajuk pendidikan dengan metodologi dialog-humanis dan pembelajaran hadap masalah (*Problem Solving*) ini diharapkan dapat membawa angin segar untuk perubahan pendidikan Indonesia yang lebih maju dan mapan.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Politik Pendidikan Paulo Freire dan Kaitannya dengan Pendidikan di Indonesia (Studi Analisis Dialektis Paulo Freire)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kurikulum yang merupakan sistem pendidikan masih dalam tahap perbaikan.
2. Menghasilkan pendidikan yang bertendensi kepada nilai-nilai kemanusiaan (humanisasi).
3. Rekonstruksi pendidikan sebagai suatu konsientisasi yang berkelanjutan
4. Rendahnya mutu dan daya saing pendidikan terhadap akses pendidikan, pemerataan pendidikan dan kualitas pelayanan pendidikan.
5. Kebijakan pemerintah dalam bentuk supervisi dan sertifikasi kepada guru belum dapat terlihat maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan.

1.3 Fokus Kajian

Guna mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada Analisis dialektis dalam Buku Politik Pendidikan Karya Paulo Freire dan Kaitannya dengan Pendidikan di Indonesia. Kerangka pemikiran Politik Pendidikan Paulo Freire yang bersifat pendidikan humanisme dan pembebasan ini disandingkan dengan konteks politik pendidikan di Indonesia saat ini yang kemudian dijadikan sebagai rujukan perubahan dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam menghidupkan kembali gairah politik pendidikan yang sesuai dengan tujuan negara.

Dialektika merupakan suatu konsep yang dituangkan oleh Hegel untuk menemukan suatu hal baru dengan rumusan dasarnya terbagi menjadi 3, yakni thesis, anti thesis, dan sintesis. Sedangkan Paulo Freire untuk mencapai proses dialektika tersebut ia menggunakan suatu metode dialog sebagai ungkapan dialektis yang ia jumpai dalam ranah pendidikan.

- 1) Buta huruf adalah suatu kebudayaan bisu dalam pendidikan semasa ia hidup di Amerika Latin.
- 2) Manusia berkuasa atas dirinya sendiri (berdikari) untuk mencapai kehidupan yang cemerlang.

- 3) Tujuan akhir dari pendidikan adalah pembebasan yang dimana manusia dapat hidup merdeka atas kehendak dan nurani nya sebagai manusia dan menciptakan serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan atas sesamanya (humanisme).

1.4 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka penelitian haruslah merumuskan terlebih dahulu masalahnya dengan jelas, sehingga akan jelas darimana memulai suatu penelitian, dimana lokasi penelitian dan apa yang menjadi objek yang diteliti.

Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah dalam menginterpretasikan data dan fakta yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Perumusan masalah juga penting agar penulis dapat menentukan batasan-batasan dalam penelitiannya.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep politik pendidikan Paulo Freire?
2. Bagaimana pengaruh politik pendidikan Paulo Freire terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia?
3. Bagaimana aktualisasi pemikiran Paulo Freire dalam pendidikan di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan cerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, selain itu tujuan penelitian juga dilaksanakan guna penelitian tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji konsep politik pendidikan Paulo Freire.
2. Untuk mengkaji pengaruh politik pendidikan Paulo Freire terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.
3. Untuk mengkaji aktualisasi pemikiran Paulo Freire dalam pendidikan di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya mengadakan penelitian adalah usaha untuk memenuhi rasa ingin tahu seseorang tentang sesuatu hal, agar hal tersebut menjadi jelas. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengetahui politik pendidikan berbasis pembebasan dan humanistik dari pemikiran Paulo Freire.
 - 2) Untuk mengetahui dampak dan kondisi praktis politik pendidikan di Indonesia dari pemikiran Paulo Freire.
 - 3) Untuk mengetahui dampak dan kondisi praktis politik pendidikan di Indonesia dari pemikiran Paulo Freire.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Sebagai bahan untuk merumuskan konsep pendidikan berbasis pendidikan dan humanistik dalam ranah politik pendidikan.
 - 2) Sebagai informasi dan wawasan bagi pemerhati pendidikan terkait konsep pendidikan berbasis pembebasan dan humanistik Paulo Freire.

